

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum**

Oleh

**AHMAD YUNUS
NPM. 1521020091**

Jurusan : Syariah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Srjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum**



Pembimbing I: Dr.Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara., sehingga adanya Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi .

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Dalam Penyelenggaraan Transportasi?, Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dalam Penyelenggaraan Transportasi? Adapun Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui secara mendalam penerapan terhadap peraturan transportasi daerah kota Bandar Lampung Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan penyelenggaraan transportasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan tujuan mengumpulkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Dinas Perhubungan belum sesuai terhadap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi terdapat dalam pasal 99 yaitu (1) menunjuk Dinas Perhubungan atau dalam sebutan lain sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini; (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Adapun Pandangan hukum Islam terhadap penyelenggaraan transportasi tidak mentaati penguasa Dalam kajian Hukum Islam keberadaan lembaga Dinas Perhubungan (Dishub) sangat penting, karena jika tidak adanya pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan. Keberadaan pengawas penyelenggaraan transportasi sudah sesuai dalam hukum islam dan tidak bertentangan dengan pengawasan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, atau lembaga yang disebut dengan *Al-Hisbah*, menegakan keadilan dan kebenaran dan menghimbau kepada yang *ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah kepada yang *munkar* (keburukan), mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan transportasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmih Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax. (0721)703531,780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbingdan mengoreksi skripsi
Saudara:

Nama Mahasiswa : Ahmad Yunus
NPM : 1521020091
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No. 10
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Transportasi Menurut Hukum Islam (Studi
di Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung)"

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Drs.H.M.Wagianto, S.H., M.H
NIP.196201111994031001

Eko/Hidayat, S.Sos., M.H
NIP.1975123020031211002

**Ketua Jurusan
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag. M.H
NIP.197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmih Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax. (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Menurut Hukum Islam (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)"**. Disusun oleh **Ahmad Yunus, NPM 1521020091**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** Pada **Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2019**.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

Penguji Utama : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

Penguji I : **Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

Penguji II : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**



Dekan

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Khairuddin, M.H.

196210221993031002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa [4]: 58)*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Soleha, yang senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, dukungan kepada penulis dan selalu mendidik dan membesarkanku dengan do'a sehingga aku semakin yakin ridha Allah SWT adalah keridhaanmu.
2. Kakak-kakak tercinta Asan Ali, Herwansyah, Abdul Halim, Mega Wati yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah selalu meridhoi disetiap langkah-langkahnya.
3. Kepada Adik-adik tercinta Nurhayati, Mardiyah Indah, Cristina Wiranda yang telah memberi semangat dan terus mendo'akan untuk keberhasilanku, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan tercapai cita-citanya.
4. Kepada Siti Maisaroh terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan kemudahan setiap langkah-langkahmu.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Yunus, seorang anak yang dilahirkan di Batu Badak, kecamatan Marga Sekampung, kabupaten Lampung Timur tepatnya pada tanggal 15 Februari 1994 yang merupakan anak kelima dari delapan bersaudara, pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Soleha.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Batu Badak, Marga Sekampung, Lampung Timur lulus pada tahun 2002. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Batu Badak, Marga Sekampung, Lampung Timur, lulus pada tahun 2008. Lanjut Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Marga Sekampung, Lampung Timur, lulus pada tahun 2011. Sekolah lanjutan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung, Lampung lulus pada tahun 2014. Tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi (Studi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”, dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabat dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program sarjana satu (S-1), pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto., S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing, memberi arahan kepada penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing sejak awal perkuliahan dan banyak memberi motivasi, nasehat, serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Karyawan dan staf perpustakaan yang telah merawat buku serta memberi pelayanan terbaik.
8. Sahabat selamanya, Jalal Fauzi, Rianda Saputra, M.Alfieyan, Roky Oktachandra, Raka Wijaya, Daratul Inayah, yang telah saling berbagi suka dan duka serta meluangkan waktu dalam canda dan tawa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan di masa mendatang. Amiin.
9. Sahabat sejak dari SMA Riza, Ferdinan, Rey, Nuzul terimakasih telah memotivasi dan meluangkan waktu dalam canda dan tawa dan dukungan kepada penulis semoga diberikan kesuksesan di masa mendatang. Amiin.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015 khususnya kelas D, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2019

Ahmad Yunus
1521020091



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	16
1. Pengertian Transportasi.....	16
2. Peraturan Transportasi Dan Lalu Lintas Jalan	21
B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi	24
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	24
2. Kebijakan Peraturan Daerah	28
C. Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Hukum Islam.....	37
2. Sumber Hukum Islam	41
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	51
4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	56
5. Siyasah Syar'iyah.....	61
6. Siyasah Dusturiyyah.....	66
D. Tinjauan Pustaka	73

BAB III PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2017 DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Bandar Lampung	76
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ...	76
2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	77
3. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Mengatur Penyelenggaraan Transportasi	79
4. Struktur Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	86
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Transportasi Kota Bandar Lampung	88
1. Upaya Dinas Perhubungan dalam Mengenai Penyelenggaraan Transportasi	88
2. Pelaksanaan Dinas Perhubungan dalam Peraturan Daerah.....	89

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang PenyelenggaraanTransportasi	94
B. Pandangan Hukum Islam Dalam Penyelenggaraan Transportasi	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Menurut Hukum Islam (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.¹

2. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi

¹Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan ialah proses atau cara menyelenggarakan dalam berbagai pelaksanaan.²

4. Transportasi

Transportasi yaitu pengangkutan barang-barang oleh berbagai jenis kendaraan.³

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan yang telah di tentukan oleh Allah SWT berupa aturan-aturan dan larangan bagi umat muslim.⁴

Pengertian menurut istilah di atas, maka yang dimaksudkan dengan judul dapat ditegaskan bahwa suatu hukum islam yang membicarakan peraturan penyelenggaraan transportasi dan peranan suatu pemerintah dalam peraturan daerah tersebut.

Pelanggaran yang berkaitan dengan saksi, terkait juga dalam Pasal 45-47 yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi untuk memilih dan membahas judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Menurut Hukum Islam (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

² Arif Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi terbaru, Mahkota Kita, h. 261.

³ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 483.

⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Cetakan Ke empat), h. 154.

1. Alasan Objektif : Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan tidak menaati peraturan daerah tersebut.
2. Alasan Subjektif : Judul skripsi ini pembahasannya sangat relevan dengan ilmu yang penulis tekuni di jurusan Siyasa.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana Jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;

2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana⁵ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Undang-Undang RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini yang dimaksud dengan Pasal 1 yaitu: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,

⁵Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), h. 147.

⁶Nomensen Sinamo, *Ibid*, h. 148.

Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁷

Kebijakan dalam menangani peraturan yang sudah ditentukan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, penjelasan Peraturan Kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD 1945 Republik Indonesia dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.

Di dalam masalah ini bahwa masih banyaknya pelanggaran Mengenai permasalahan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi terdapat Pasal pelanggaran yang berkaitan dengan saksi, kenapa masih terjadi sedangkan peraturannya sudah jelas di dalam Bab V mengenai Sarana, Bagian kedua yaitu Penderekan dan Penguncian Roda dalam hal ini terdapat dalam Pasal 46, dan 47 yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi yaitu⁸ :

Pasal 46

1. Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan oleh Dinas dengan dibuatkan berita acara.

⁷Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Yogyakarta: Pusataka Mahardika, 2017), h. 3.

⁸Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi, h. 19.

2. Lembaran Pertama berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
3. Setelah berita acara disampaikan kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik atau pengemudi apabila kendaraan bermotor tidak diambil.

Pasal 47

1. Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan tindakan berupa penguncian dengan cara mengunci roda (*wheel lock*) kendaraan.
2. terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan kunci roda (*wheel lock*) sebagaimana pada ayat (1) dibuatkan berita acara.
3. Lembaran pertama berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
4. Apabila pemilik atau pengemudi melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat kunci roda (*wheel lock*) kendaraan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan-aturan dan larangan bagi muslim.⁹ Alquran adalah wahyu Allah SWT, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Sebagai sumber hukum (sumber Naqli) dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah. Al-Qur'an adalah kitab suci Agama Islam.

⁹Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Cetakan Ke empat), h. 154.

Allah Swt, menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangan-Nya. Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunah Rasul. Sumber *syara'*,¹⁰ banyak ahli hukum yang membagi sumber hukum Islam menjadi sumber-sumber pokok yang telah disebutkan yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama jangka waktu 23 tahun, yaitu 13 tahun ketika berada di Mekah dan 10 tahun ketika hijrah ke Madinah. Waktu yang diturunkan di Mekah disebut ayat Makiyah, isinya kebanyakan mengatur tentang keimanan. Adapun ayat yang turun di Madinah disebut ayat Madaniyah, isinya kebanyakan mengatur kehidupan manusia dalam hal *mu'amalah*, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Alquran terdiri atas 30 juz, 144 surah, dan 6666 ayat. Dimana 4547 ayat perlu ditafsirkan. Tafsir ialah pemeberian keterangan atau arti supaya dapat jelas yang dimaksudkan.

2. Sunah

Yang dimaksud dengan sunah adalah cara-acara hidup nabi Muhammad sehari-hari.

3. Ijma'

Ialah kebulatan pendapat para ualam besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam.

¹⁰ Palmawati Tahir, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 17.

4. Qiyas

Menurut hukum Islam, *qiyas* artinya menetapkan suatu hukum dari suatu masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memerhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.¹¹

Pandangan penyelenggaraan transportasi menurut hukum Islam transportasi dalam Al-Qur'an, adapun dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya terdapat dalam firman Allah, (Surah An-Nisa: 59)¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

“Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalal yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud 3594 Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani).

¹¹ Palmawati Tahir, *Ibid*, h. 19.

¹² Al-Qur'an Surah An-Nisa: 59.

Penulis menduga bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tidak melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi khususnya pada pasal 46 dan pasal 47. Seperti di jalan Teuku Umar-Zainal Abidin Kedaton dan jalan Sultan Agung di depan Mall Transmart Kota Bandar Lampung.

Pemahaman perintah untuk taat kepada *ulil amri*, dan memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Aturan lalu lintas, termasuk aturan yang kita sepakati. Yang telah dibahas oleh mereka yang paham hukum, mewakili masyarakat umum.¹³ Berdasarkan penjelasan beberapa istilah dapat disimpulkan bahwa maksud peran peraturan daerah dalam penyelenggaraan aturan transportasi dan hukum Islam dalam penyelenggaraan transportasi.

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggara Transportasi, yang khususnya dipasal 46 dan 47 yang mengatur transportasi di kota Bandar Lampung dimana masih terjadinya pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh dinas perhubungan kota bandar lampung menurut hukum islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

¹³ <https://konsultasisyariah.com>

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan transportasi pada pasal 46 dan 47?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi pada pasal 46 dan 47?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara mendalam penerapan terhadap peraturan transportasi daerah kota Bandar Lampung, peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi khususnya pada pasal 46 dan 47.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan penyelenggaraan transportasi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan dan memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang teori dan praktik penerapan peraturan transportasi terhadap Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi.

- b. Kegunaan secara praktis, untuk memberikan informasi serta referensi yang berguna bagi para pelaku, masyarakat, pemerintah serta peneliti selanjutnya yang berkaitan penyelenggaraan transportasi ini.

G. Signifikansi penelitian

Signifikansi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan sosial yang ada terhadap Peraturan Daerah No 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transfortasi yang kususnya dipasal 46 dan 47 di tinjau dari Hukum Islam.

- b. Secara praktis

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis
2. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Radenintan Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁴ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode :

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang langsung dilaksanakan dilapangan.¹⁵ Yang menjadi objek penelitian ini adalah Lembaga Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang menggerakkan peraturan penyelenggaraan transportasi.
- b. Sifat Penelitian, yaitu penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena variabel Dinas Perhubungan dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung seperti adanya peraturan daerah dalam penyelenggaraan transportasi di kota Bandar Lampung.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara *observasi* di kantor Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung serta mencantumkan berbagai literatur seperti data penyuluhan atau bahan dari buku-buku yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dianalisa kerangka pemikiran teoritis.¹⁷ Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

¹⁵ Susiadi AS, *Ibid*, h. 10.

¹⁶ M, Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 43.

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), h. 132.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Yaitu usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber data.¹⁹

b. Metode Wawancara

Adalah proses memproses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau responden, atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁰

c. Metode Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada.²¹

¹⁸ Tatang M. Amirin, *Ibid*, h. 133.

¹⁹ Soertano, *Metododlogi Peneleitian*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995), h. 99.

²⁰ Nazir, *Ibid*, h. 170.

²¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 57.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²² Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dari kantor Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung yang berjumlah 1.740 pegawai.
- b. Sampel, sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²³ Sampel diambil tidak diacak melainkan dipilih sendiri oleh peneliti, karena peneliti hanya mengambil sampel dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti/ Yang menjadi sampel di penelitian ini ialah bapak Iskandar Z, S.H sebagai Bidang Lalu Lintas Jalan, dan bapak Afrully Rahmat, S. Sos sebagai Bidang Seksi Teknik Sarana.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus rumus tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- c. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.²⁴

²² Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 147.

²³ Juliansyah, *Ibid*, h. 155.

²⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115.

- d. *Koding*, Usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data dan Dinas Perhubungan dan tokoh masyarakat selanjutnya akan diproses untuk mengetahui apakah data sudah sesuai atau tidak dengan pembahasan yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁵
- e. *Rekontruksi Data (reconstructing)*, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.
- f. *Sistemizing*, menempatkan data dari Dinas Perhubungan dan tokoh masyarakat menurut sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁶

6. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif dengan metode berfikir Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit seperti data penyelenggaraan aturan transportasi.

Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang mengetahuinya bersifat umum.²⁷

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 54.

²⁶ Emzir, *Ibid*, h. 55.

²⁷ Emzir, *Ibid*, h. 3.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Transportasi

Transportasi berasal dari kata transportation, dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum atau pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin.²⁸ Bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan).²⁹

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi³⁰:

²⁸Mariangan Masry Simbolon, *Ibid*, h. 2.

²⁹Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 7.

³⁰Tim Permata Press, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PM Nomor 26 Tahun 2017*, Pasal 7, h. 27-28.

- a. Urusan Pemerintah di bidang jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab dibidang jalan;
- b. Urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Urusan Pemerintah di bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- d. Urusan pemerintah di bidang Registrasi dan Indentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan Hukum Operasional, Manajemen, dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Transportasi adalah proses perpindahan suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakan tenaga manusia, hewan atau mesin. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.³¹

Pembinaan transportasi merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan perhubungan secara nasional yang dikuasai oleh Negara, dibina oleh

³¹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017, h. 1.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pembinaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi³²:

- a. Pembinaan prasarana dan atau ruang lalu lintas;
- b. Pembinaan sarana angkutan;
- c. Pembinaan terhadap penyedia dan pengusaha jasa transportasi;
- d. Pembinaan teknis pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
- e. Pembinaan teknis dan operasional;
- f. Pembinaan keterpaduan antar moda;
- g. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. Pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi.

Jenis-jenis angkutan umum secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia tidak dijumpai pengangkut, kecuali pengangkutan laut. Pengangkut ialah pihak yang mengaitkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang.

Berdasarkan statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengangkutan dapat dikelompokkan dalam empat jenis yaitu:

- a. Perusahaan pengangkutan kereta api

Menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, pengangkut yaitu badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum, wajib memiliki izin oprasi dari pemerintah.

³²Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Transportasi*, Pasal 2, h. 7.

b. Pengangkutan pada pengangkutan jalan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pengangkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan. Kendaraan umum adalah sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

c. Pengangkutan pada pengangkutan perairan

Pengangkutan di perairan adalah kegiatan mengangkat dan/atau memindahkan penumpang/barang dengan menggunakan kapal.

d. Pengangkutan pada pengangkutan udara

Angkutan udara mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa angkutan udara serta meningkatkan pelayanan, peningkatan armada atau pesawat udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa dan pengembangan jasa-jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi.³³

Para pemakai jasa transportasi baik pemilik barang maupun penumpang mengharapkan pengangkutan yang aman atau beriklas

³³Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 17.

kompensasi atas kerugian, baik kehilangan ataupun perjalanan yang lebih luas dalam waktu yang terbatas.³⁴

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *Social engineering*. Alat pengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru.³⁵

Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas berarti sebuah aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja, yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya.³⁶

Adapun fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

³⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung: PT Aditya Citra Bakti, 2013), h. 58.

³⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 164.

³⁶Raharjo Adisasmita, *Ibid*, h. 26.

keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.³⁷

2. Peraturan Transportasi dan Lalu Lintas Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Dalam menjalankan aturan di atas demi mewujudkan suatu penegakan hukum yang berlaku seperti yang di cita-citakan tidak selamanya berjalan sesuai apa yang menjadi harapan hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor adapun faktor yang menjadi hambatan yang menjadi implementasi standar ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.³⁸

Apabila terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pengendara baik dari roda dua maupun roda empat yang seringkali memarkirkan kendaraannya tidak sesuai pada aturan yang telah ditetapkan. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang dinilai paling mengganggu kenyamanan pengguna transportasi darat, kemacetan dapat mengurangi efektifitas kerja maupun kegiatan masyarakat memperlambat manusia untuk melakukan aktifitas dan meningkatkan polusi udara.

Kemacetan lalu lintas di jalan raya disebabkan ruas-ruas jalan sudah tidak mampu menampung luapan arus kendaraan yang datang serta luasan dari jalan tersebut tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang melintas.

³⁷Ishaq, *Ibid*, h. 247.

³⁸Rensius pasar ibu, Implementasi Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tinjau dari Perspektip Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Pasaribu*, Vol 4, No 2 (2016).

Hal ini juga terjadi, karena pengaruh hambatan samping yang tinggi, sehingga mengakibatkan penyempitan ruas jalan, seperti: parkir di badan jalan, berjualan di trotoar dan badan jalan, pangkalan becak dan angkutan umum, kegiatan sosial yang menggunakan badan jalan, serta adanya masyarakat yang berjalan di badan jalan. Selain itu, kemacetan juga sering terjadi akibat manajemen transportasi yang kurang baik, ditambah lagi tingginya aksesibilitas kegunaan lahan di sekitar sisi jalan tersebut.³⁹

Implementasi aturan demi terwujudnya suatu penegakan hukum yang seperti yang dicita-citakan tidak selamanya berjalan sesuai apa yang menjadi harapan hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang menjadi hambatan internal dalam implementasi pelaksanaan penyelenggara transportasi, antara lain:

a. Faktor hukum itu sendiri

Kebijaksanaan yang memungkinkan beberapa jenis kendaraan berjalan dalam suatu ruas jalan telah memberikan konstibusi yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan.

b. Faktor Desain Jalan

Sering terjadi kemacetan karena pengendara transportasi, dikarenakan tidak mematuhi peraturan lalu lintas jalan.

³⁹Mochammad Galuh Fauzi, Elisa Susanti, Budiman Rusli, *Analisis Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Menurut Teori The Managerial Delicision-Making Process E. F. Harrison, Responsive*, Volume 1 No. 2 Desember 2018, h. 56.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan dilapangan dimana sumber daya manusia akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai.

d. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

Banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti plang rambu-rambu lalu lintas jalan yang rusak, dan kurangnya prasarana yang mendukung sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam transportasi.⁴⁰

Sedangkan hambatan eksternal dalam implementasi peraturan daerah tentang transportasi antara lain:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas baik roda (2) atau roda (4) bahwa masyarakat kurang memperhatikan aturan-aturan transportasi yang sudah ditetapkan peraturan daerah walikota Bandar Lampung.

b. Faktor kesadaran

Bahwa pengemudi tidak terlalu melihat efek apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan maka akan menyebabkan kecelakaan, ditabrak dari belakang, kemacetan dan lain lain yang mengenai berlalu lintas, kesadaran nya tidak ada masyarakat terlalu mementingkan diri sendiri.

⁴⁰<http://nitastory.blogspot.co.id/2008/12/peningkatan-keselamatan-lalu-lintas-dan.html>, diakses tanggal 27 September 2019.

c. Faktor penunjang

Pengemudi dapat memberikan kontribusinya dalam upaya meningkat kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatan, ketertiban, kemacetan karna itu salah satu memberikan penunjang untuk masyarakat yang sangat relatif.

d. Faktor pengemudi⁴¹

Penguna jalan adalah harapan yang sangat besar dan juga harapan yang terakhir dalam ketertiban transportasi.

B. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi

1. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda. Dalam ayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Ayat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan, yaitu:

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

⁴¹<http://nitastory.blogspot.co.id/2008/12/peningkatan-keselamatan-lalu-lintas-dan.html>, diakses tanggal 27 September 2019.

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴²

Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan, Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.⁴³

Hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.⁴⁴

Praktik hukum penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.⁴⁵

Selain muatan materi tersebut, perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴² Hasyimzoem, Yusnaini dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.146.

⁴³ *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2017), h. 2.

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

⁴⁵ Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 246.

Menurut bagaimana bahwa peraturan daerah memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal, yaitu:

a. Fungsi stabilitas

Peraturan daerah berfungsi dibidang ketertiban dan keamanan yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat di daerah. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, upah, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain lain. Demikian pula, dilapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

b. Fungsi perubahan

Peraturan daerah dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan juga aparat pemerintah, mekanisme kerja maupun kinerjanya itu sendiri. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi sebagai sarana pembaharuan (*law as social engineering, ajaran Roscoe Pound*).

c. Fungsi kemudahan

Peraturan daerah dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (Fasilitas). Peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan insentif lainnya merupakan contoh kaidah-kaidah kemudahan.

d. Fungsi kepastian hukum

Fungsi kepastian hukum (*rechtzekerheid, legal certainty*) asas penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum (*rechthandeling*) dan penegakan hukum (*rechthanhaving, echtsuitvoiring*).⁴⁶

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.⁴⁷

Perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh menteri.⁴⁸

Ditingkat daerah, ada pula Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum di tingkat daerah ini, mengikuti pola Gubernur dengan persetujuan DPRD.⁴⁹

⁴⁶Hasyimzoem, Yusnaini dkk, *Ibid*, h. 147.

⁴⁷Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 13.

⁴⁸A'an Efendi, *Hukum Administrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h. 68.

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8.

2. Kebijakan Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Wali kota. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten /kota.

Kebijakan dalam menangani peraturan yang sudah ditentukan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, penjelasan peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung.⁵⁰

Undang-undang dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, di dalamnya telah dicantumkan adanya sanksi dan mengikat masyarakat secara umum. Istilah undang-undang dalam arti formil dan materil merupakan terjemahan dari *wet in formelesin* dan *wet in materielesin* yang dikenal Belanda. Undang-undang dalam arti formil (*wet in formelesin*) merupakan yang dibuat oleh *Regering* dan *Staten General* bersama-sama (*gejamenlijk*) terlepas apakah isinya peraturan (*regeling*) atau penetapan (*beschikking*). Sedangkan undang-undang dalam arti

⁵⁰ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 178.

materil (*wet in materielezin*) adalah setiap keputusan yang mengikat umum.⁵¹

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁵²

Literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁵³

Desentralisasi adalah instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Dapat disimpulkan, tujuan

⁵¹Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012. h. 45.

⁵²Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan V (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), h. 116.

⁵³Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.

utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkure. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama.⁵⁵

Penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijaksanaan (*policy*) pemerintahan yang baru, yang sebaiknya diambil dalam sektor pembangunan yang tertentu, misalnya penelitian hukum mengenai kebijaksanaan di bidang hukum perhubungan, dan sebagainya.⁵⁶

Penegakan hukum (*rule of law*) *good governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat demokrasi adalah adanya penegakkan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandnag bulu. Langkah awal penciptaan *good Governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat

⁵⁴Juniarso Ridwan, *Ibid*, h. 129.

⁵⁵Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 158.

⁵⁶Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 22.

lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).⁵⁷

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi Sistem Pemerintahan Pusat dan Sistem Pemerintah Daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada Pemerintah Daerah.⁵⁸

Pemerintah daerah dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di masa yang akan datang, ketentuan mengenai pembuatan hukum seperti ini masih harus disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi itu nantinya misalnya, jika nantinya DPRD tingkat provinsi ditiadakan, dan DPRD hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota, maka otomatis ketentuan mengenai Peraturan Daerah itu hanya akan ada di tingkat Kabupaten Kota, sedangkan produk-produk hukum di tingkat provinsi yang dikeluarkan oleh Gubernur yang hanya akan berperan sebagai Kepala Wilayah, masih perlu dipikirkan baik

⁵⁷Setiawan, Yudhi, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 60.

⁵⁸Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 11.

bentuknya maupun otoritas kedudukannya sebagai produk hukum di tingkat provinsi.⁵⁹

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya, dengan Kepala Daerah sebagai penanggung jawab tunggal dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah provinsi.⁶⁰

Kepala daerah adalah orang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Kedudukan kepala daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sama tingginya, contohnya: Gubernur, Bupati, Walikota. Tugas kepala daerah yang utama adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab penuh atas jalannya pemerintah daerah. Pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dilakukan oleh presiden. Kepala daerah harus bertanggungjawab kepada presiden karena pemerintahannya di seluruh wilayah negara.⁶¹

Otonomi daerah merupakan asensi pemerintahan desentralisasi. Di dalam otonomi hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.⁶² Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara keatuan. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang berbentuk federasi.

⁵⁹Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, h. 9.

⁶⁰Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 17.

⁶¹Ali, *Pengertian Kepala Daerah, Tugas, dan Pemilihan Kepala Daerah*, <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-kepala-daerah-tugas>.

⁶²Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 83.

Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi segenap kewenangan Pemerintah Daerah kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.⁶³

Sebagai wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber sendiri, yang didukung oleh perimbangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan persyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.⁶⁴

Reformasi telah memenuhi jalan buntu dan gagal mencapai misi dan tujuan, ketika diberbagai instansi dan lapisan masyarakat terdapat fenomena cepat puas diri. Mereka terlalu optimis untuk dapat dan mampu melaksanakan reformasi pada instansi pemerintah. Mereka menganggap mudah untuk memotivasi aparatur negara untuk melaksanakan pembaharuan.

Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur negara masih lemah, kekoordinasi internal dan eksternal masih rendah, ketersediaan prasarana dan sarana terbatas, etos kerja masih rendah pula, sehingga menimbulkan resistensi terhadap perubahan yang didengungkan, karena tidak memiliki *sensi of urgency* (kesadaran dan kepedulian akan urgensi dari langkah-langkah yang harus dilakukan). Akibatnya, kebijakan, program dan aktivitas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran instansi menjadi berkinerja rendah atau gagal.

⁶³J. Kaoloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 3.

⁶⁴Abdul Halim dan Ibnu Mujib, *Problematisa dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009), h. 76.

Komplik kepentingan dalam lingkungan instansi pemerintah perubahan besar dan dan pembaharuan hanya mungkin dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang *proaktif* dan *visioner* (memiliki visi akan tercapainya kondisi yang lebih baik kondisi yang lebih baik pada masa depan). Konflik kepentingan yang eksplisit maupun yang terselubung didalam lingkungan instansi pemerintah harus dihilangkan agar dapat mencapai kinerja yang tinggi.⁶⁵

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, daerah selain diberi wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Pembagaian urusan pemerintah di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.⁶⁶

Pencapaian kinerja yang tinggi dibarengi dengan langkah-langkah melakukan restrukturisasi kelembagaan organisasi, mempertajam tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, serta memperhatikan kekuatan resistensi terhadap perubahan dengan melakukan revitalisasi perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintah. Meningkatkan komitmen dan berperan besar dalam melakukan perubahan, oleh karena itu visi

⁶⁵Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 18.

⁶⁶Siswanto Sunaryo, *Hukum Pemerintah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 57.

mengarahkan dan memprbaiki inspirasi untuk bertindak baik dan benar (hemat, efektif, efisien, adil, unggul dan taat asas).

Adanya visi yang baik, upaya reformasi dengan mudah berubah menjadi daftar keinginan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang membingungkan, tidak sesuai dan memboroskan perhatian dan sumberdaya serta memperlemah rasa percaya diri untuk mencapai sukses. Visi, misi dan strategi pembangunan yang dipahami, dipercayai, dan diterapkandenganbaik dan benar untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁷

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi, bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam upaya penataan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang transportasi khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur ketentuan penyelenggara transportasi di Kota Bandar Lampung sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Pasal pelanggaran yang berkaitan dengan saksi, terkait juga dalam

Bab V mengenai Sarana, Bagian kedua yaitu Penderekan dan Penguncian

⁶⁷Rahardjo Adisasmita, *ibid*, h. 26.

⁶⁸Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Menimbang b dan c.

Roda dalam hal ini terdapat dalam Pasal 46, dan 47 yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi yaitu :

Pasal 46

1. Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan/atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan oleh Dinas dengan dibuatkan berita acara.
2. Lembaran Pertama berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.
3. Setelah berita acara disampaikan kepada pemilik/pengemudi kendaraan bermotor, maka segala kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik atau pengemudi apabila kendaraan bermotor tidak diambil.

Pasal 47

1. Kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang dilakukan tindakan berupa penguncian dengan cara mengunci roda (*wheel lock*) kendaraan.
2. terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan kunci roda (*wheel lock*) sebagaimana pada ayat (1) dibuatkan berita acara.
3. Lembaran pertama berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilik atau pengemudi.

4. Apabila pemilik atau pengemudi melakukan pengerusakan atau menghilangkan alat kunci roda (*wheel lock*) kendaraan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Sebelum mempelajari tentang hukum Islam yang menjadi kajian ini, maka sebaiknya dimulai dengan memahami Islam terlebih dahulu. Islam sebagai agama merupakan induk meteri dari hukum Islam tersebut. Dalam hukum Islam tidak mungkin terpisahkan antara ajaran Islam dengan hukum Islam jadi hukum Islam adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan. Hukum Islam tidak boleh dipisahkan antara iman, akhlak dan syariah ketiga hal ini adalah ajaran Islam yang menjadi dasar untuk menerapkan hukum Islam oleh seorang muslim.⁶⁹

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia diikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Substansi hukum Islam secara keseluruhan mengatur perbuatan dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan tuhan, sesama manusia dan alam semesta/benda. Bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan disebut bidang ibadah ritual (*madhah*). Sedangkan bagian hukum Islam yang mengatur hubungan

⁶⁹Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 14.

manusia dengan manusia, manusia dengan dan alam/benda disebut muamalah (*ghaira madhah*).⁷⁰

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya.⁷¹

Manfaat yang dapat diraih dan dipahami mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur serta terarah. Dengan mentaati hukum Islam, kita juga bisa mengetahui mana perbuatan yang bermanfaat, disukai oleh Allah, dan mendapat pahala, serta kita juga mengetahui perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan jika dilakukan akan menambah dosa.

Sistem hukum Islam berkembang dan diterapkan oleh masyarakat Arab sebagai awal penyebaran agama Islam, sistem hukum ini selanjutnya berkembang di negara-negara lain, bahkan di beberapa negara Afrika dan Asia penerapan sistem hukum Islam disesuaikan dengan pembentukan negara yang bersumber pada ajaran Islam.

⁷⁰Warkum Sumitro, *Diskursus tentang Hukum Islam*, (Jakarta:Setara Press, 2017), h. 42.

⁷¹<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-islam-dan-manfaatnya>, 26 November 2019.

Adapun Sumber hukum dari sistem hukum Islam antara lain sebagai berikut⁷²:

- a. Al-Qur'an, yaitu kitab suci dari umat muslim yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul Allah Muhammad.
- b. Sunnah Nabi yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita (hadis) mengenai Nabi Muhammad.
- c. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja (berorganisasi).
- d. Qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.

Tujuan hukum Islam, masyarakat dibangun atas dasar hukum Allah SWT. Konsep dasar masyarakat berbudaya semisal membela orang-orang yang lemah, keterbukaan dalam muamalah, tidak korup dalam administrasi keadilan diperintahkan agar dilakukan. Minuman keras, Riba, Judi, dan yang senada dilarang.

Ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni (1) Syariat Islam dan (2) *Fiqih* Islam. Didalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syariat Islam disebut *Islamic Law*, sedang Fiqih Islam *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam, sering dipergunakan kata-kata hukum syariat atau hukum syara', untuk *fiqih* Islam dipergunakan istilah hukum *fiqih* atau kadang-kadang hukum (*fiqih*) Islam. Hubungan keduanya memang sangat erat tetapi tidak

⁷²Windari, Ratna Arta, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 41.

mungkin diceraikan: syariat adalah landasan *fiqih*, *fiqih* adalah pemahaman tentang syariat keduanya terdapat di dalam Alquran, dalam surat Al-Jatsiah [45]:18 dan *fiqih* dalam surat Al-Taubah [9]: 122.⁷³

Qs. Al-Jatsiah [45]:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (Qs. Al-Jatsiyah[45]: 18)⁷⁴

Qs. At-Taubah [9]:122

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Qs. At-Taubah [9]:122)⁷⁵

⁷³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 49.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qura'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Dipenogoro, 2003), h. 496.

⁷⁵ *Ibid.*, h.207

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah (1) *Al-quran* dan (2) *As-Sunnah (Al-Hadis)* serta (3) akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad* karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah (a) *ijmak*, (b) *qiyas*, (c) *istidal*, (d) *al-masalih al-mursalah*, (e) *istihsan*, (f) *istishab*, dan (g) *'urf*. Dalam uraian berikut, secara ringkas dan hanya dilihat dari beberapa seginya saja, akan disebut sumber-sumber hukum Islam tersebut.⁷⁶

a. Al-Quran

Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama. Landasan ini berdasarkan pada dalil Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 9 yang menyatakan bahwa:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, (Qs. Al-Isra': 9)⁷⁷

⁷⁶ Mohammad Daud Ali, *Ibid*, h. 78.

⁷⁷ Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali (*Al-Qura'an dan Terjemahannya*, h. 283.

Ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi orang-orang beriman yaitu ayat-ayat yang ada didalam Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan seorang muslim. Jadi Al-Quran adalah kaidah yang menjadi tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut hukum-hukum Allah SWT.⁷⁸

b. As-Sunnah

Kajian hukum Islam *as-sunnah* ini adalah sumber hukum Islam yang kedua, hal ini dijelaskan pada beberapa ayat dalam Al-Quran salah satu surah Al-Anfal ayat 46 yaitu:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَاكُمْ وَأَصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: *Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Al-Anfal: 46)*⁷⁹

Ayat diataskan menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah harus diberengi dengan ketataan kepada Nabi SAW, siapa yang taat kepada Nabi SAW adalah telah taat juga kepada Allah. Secara logika ketaatan kepada allah mengikuti semua perintahnya dengan merealisasikannya dalam kehidupan. Perintah-perintahnya adalah

⁷⁸Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 19.

⁷⁹ Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali (*Al-Qura'an dan Terjemahannya*, h. 183

wahyu yang tertuang didalam Al-quran dengan demikian ketaatan kepada Nabi SAW berarti mengikuti sunah-sunahnya.

As-sunah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu perkataan atau ucapan Nabi SAW (*sunnah qauliyah*), perbuatannya (*sunnah fi'liyah*), dan keadaan diam beliau ketika ditanya atau melihat sesuatu (*sunah sukuti atau taqririyah*).

Berkaitkan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, jika dilihat dari wujud ajaran Islam itu sendiri Rasullulah merupakan tokoh sentral yang sangat dibutuhkan, bukan sekedar untuk membawa risalah ilayah dan menyampaikan ajaran didalamnya, tetapi lebih dari itu, beliau dibutuhkan sebagai tokoh-satu satunya yang dipercayai oleh Allah untuk menjelaskan ajaran yang disampaikan melalui Al-Quran.⁸⁰

c. Ijtihad

Perkataan ijtihad berasal dari kata Ijtahadan yaitu ijthihadan yang artinya bersungguh-sungguh. Menurut pengertian secara istilahnya ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Quran dan Sunnah atau mengahabiskan kesanggupan seroang ahli figh untuk menghasilkan sangkaan (*zhann*) dengan menetapkan suatu hukum, orang yang melakukannya disebut dengan mujtahid.

⁸⁰Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Ibid*, h. 23.

Abu zahra menjelaskan tentang makna ijtiha adalah bahwa ijtiha mencari suatu kandungan hukum dengan menggunakan kemampuan akal pikiran akal manusia atau orang-orang *fuguha*, namun tetap beracuan kepada Al-Quran dan hadis.

Penetapan suatu kaidah juga harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari akidah yang diimani. Akidah tentang Allah SWT, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib.⁸¹ Maka dari itu untuk memahami konsep *masalah* sebagai inti *maqashid al-syariah* yaitu bahwa *masalah mursalah* secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. *Maslahah Mursalah* (kesejahteraan masyarakat) yakni yang dimutlakkan (masalah yang bersifat umum), menurut istilah ulama *ushul* yaitu masalah dimana *syar'i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu,

⁸¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet. 2, (Bandung: Mizan, 1994).

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.⁸²

Maqashid As-Syari'ah dalam arti *maqashid al-syar'i*, mengandung empat aspek, yaitu;

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu hukum yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *takluf* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan Syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Menurut al-Syatibi bahwasanya *Maqashid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Bisa dimaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat di analisis melalui *Maqasid al-syari'ah*.⁸³

Kajian Hukum Islam keberadaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat penting oleh karena penyelenggaraan transportasi keberadaannya dalam Hukum Islam yaitu transportasi terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Yassin ayat 41-42:

⁸²Zainal Masri, <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html/>, akses 25 November 2019.

⁸³Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar Maqasid al-Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70.

وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. (Qs. Yasin [36]:41-42)⁸⁴

Dalam hal ini hukum islam memiliki tiga orientasi, yaitu:

- a. Mendidik individu (*tahdzib al-fardi*) untuk selalu menjadi sumber kebaikan,
- b. Menegakan keadilan (*iqamat al-'adl*),
- c. Merealisasikan kemaslahatan (*al-mashlahah*).

Orientasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek dalam kehidupan duniawi tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan diakhirat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum-hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (*jalbu al-manafi*), maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (*dar'u al-mafasid*). Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara allah dengan makhluknya maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.⁸⁵

⁸⁴Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali (*Al-Qura'an dan Terjemahannya*, h.443

⁸⁵Dahlan Idhamy, *karateristik Hukum Islam*, (Jakarta: Media Sarana Press 1994), h. 23.

Sedangkan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam empat fungsi yaitu:

a. Fungsi Ibadah

Ads-Dzariat: 56, Allah berfirman: “dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk untuk beribadah kepadaku” Maka dengan daalil ini fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya.

b. Fungsi amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran), Maka setiap hukum Islam bahkan ritual dan dan spritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegahan dan kemungkaran.

c. Fungsi zawajir (penjeraan)

Adanya sangsi dalam hukum Islam yang hanya bukan sangsi hukum dunia, tetapi juga ancaman siksa akherat dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan.

d. Fungsi tandzim wa ishlah al-ummah (organisasi dan rehabilitas masyarakat).

Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan bentuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitas dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenakan dengan istilah fungsi *engineering social*.

Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilih-pilih begitu saja untuk bidang hukum tertentu tetapi satu dengan yang lain juga saling terkait.⁸⁶

Arti penting keberadaan suatu Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.⁸⁷ Oleh karena itu menurut hukum Islam bahwa setiap hak itu tidak bisa digunakan melainkan yang sudah dijelaskan oleh hukum.

Setiap perkara hukum dapat dilihat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum dibuat untuk dilaksanakan supaya terjadi ketertiban. Tujuan hukum yang sebenarnya adalah manusia. Hukum hanya sebagai alat manusia untuk mencapai tujuannya.⁸⁸

Seharusnya bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut⁸⁹:

⁸⁶Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam: Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani press, 1994), h. 25.

⁸⁷<https://dishubkominformasi.sukabumikab.go.id>.

⁸⁸Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 41.

⁸⁹Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), h. 57-58.

Hukum Perdata Islam

1. *Munakahat* (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya);
2. *Wirasah* (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagaian warisan). Hukum waris ini sering disebut hukum faraid;
3. Muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum Publik (Islam)

1. *Jinayat* (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana);
2. (*al-ahkam as-sulthaniyah*) (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya);
3. *Siyar* (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama, dan negara lain);
4. Mukhamasat (mengatur soal peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara).

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para fuqaha:⁹⁰

⁹⁰Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Cetakan ke-20, (Bandung: PT. Alma'arif, 2001), h. 311.

- a. Yang bersifat perintah larangan atau pilihan. Golongan ini bernama Hukum *Takliefy* yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.
- b. Yang bersifat menunjukan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama Hukum *Wadhi'i*.

Adapun hukum *Wadhi'i* terdapat tiga macam:⁹¹

- a. Terdapat sebab, adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari:
 - b. Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
- c. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari:
 - 1) Syarat menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan zakat.
 - 2) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat sholat.

Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena ada nya menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari:

⁹¹M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, h. 16.

- a. Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima warisan.
- b. Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman qisas, tetapi karena statusnya sebagai bapak menghalangi dijatuhkannya hukuman qisas.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu:⁹² (1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan (2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan,. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

- a. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
- b. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: *muamalah*, *munakahat*, dan *ukubat*.

- 1) *Muamalah* mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihanutang, syarikat dagang, dan lain-lain).
- 2) *Munakahat*, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curtele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum

⁹²Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 6-7.

keluarga dalam bahasa Arab disebut *Al-Ahwal Al-Syakhsiah*.

Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.

- 3) *Ukubat* atau *Jinayat*, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya.

Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu (a) *mukhsamat*, (b) *siyar*, (c) *ahkam as-sulthaniyah*. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Mukhsamat*, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.
- b. *Siyar*, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.
- c. *Ahkam As-Sulthaniyah*, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.

Al-ahkam As-Sulthaniyah berasal dari bahasa arab, *ahkam*, jamak dari hukum, menahan ketentuan, dan ketetapan atas sesuatu, *as sulthaniyah* adalah kata sifat dari *sulthan* (dalil, hujjah, pengaruh, pemerintahan atau kenegaraan. Hukum atau ketentuan yang menyangkut kekuasaan atau pemerintahan/kenegaraan.⁹³

⁹³*Al-hanbali, Abu Ya'la Muhammad Ibnu al-Husein, Al- Ahkkam as-Sulthaniyah. Beitut: Daar al fikr, 1994.*

Al ahkam as sulthaniyah berasal dari bahasa arab, ahkam, jamak dari hukum-hukum, menahan ketentuan, dan ketetapan atas sesuatu, *as Sultaniyyah* adalah kata sifat dari sultan, dalil, hujjah, pengaruh, pemerintahan, dan kekuasaan. Hukum atau ketentuan yang menyangkut kekuasaan atau pemerintahan/kenegaraan.

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengandung ketentuan tentang hubungan manusia dengan tuhan saja, yang berupa aturan-aturan peribadatan, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan benda, dan manusia dengan alam sekitarnya, yang bertuang dalam hukum-hukum tentang *muamalah*, *al al munakahat wa al usrah* (pernikahan dan rumah tangga), mawaris (warisan), *al-jinayat wa al-'uqubat* (pidana dan kriminalitas), jihad dan peradilan. Sebagian dari ketentuan-ketentuan tersebut tercakup dalam hukum atau ketentuan yang menyangkut aturan dan tata tertib dalam masalah kekuasaan atau pemerintahan/kenegaraan.⁹⁴

Ahkamud dusturiyah (hukum perundang-undangan) yaitu hukum yang berhubungan dengan asas dan cara pembuatan undang-undang. Tujuan hukum ini ialah untuk menjamin hak-hak perseorangan dan masyarakat dan mengatur hubungan penguasa dengan rakyat, *Ahkamud dauliyah* (hukum internasional) yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Negara islam dalam bidang-bidang perdamaian keamanan, perekonomian, kebudayaan dan lain-lain.⁹⁵

⁹⁴<http://dhylaexotic.blogspot.com/2014/05/makalah-ushul-fiqih-al-ahkam-as.html>

⁹⁵Hafidz Abdurrahman, Imam al-Maawardi *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2017), h. 12.

Ketentuan-ketentuan *al ahkam as sulthaniyyah* Imam al Mawardi, ahli fikih madzhab syafi'i, menyebutkan bahwa ruang lingkup *al ahkam as sulthaniyyah* mencakup dua puluh ketentuan, yaitu: '*aqd al imamah* (ketentuan tentang pengangkatan imam atau pemimpin), *taqlid al wizarah* (pendelegasian [jabatna] kementerian), *taqlid al imarah 'ala al bilad* (pendelegasian jabatan kepada pemerintahan wilayah), *taqlid al imarah 'ala al jihad* (pendelegasian jabatan kepada pemimpin peperangan), *al- wilayah 'ala al hurub al masallih* (kekuasaan atas penumpasan kedamaian), *wilayah al-qada'* (kekuasaan peradilan), *wilayah al- mazalim* (kekuasaan peradilan khusus, yang menyangkut penyelesaian perkara penyelewengan pejabat negara).

Ketentuan tentang pengangkatan imam atau pemimpin diatur hukum mengangkat seorang pemimpin dalam suatu wilayah Negara, syarat orang yang dapat diangkat sebagai pemimpin, cara pengangkatannya, hak-hak dan kewajiban umat (rakyat), penyelewengan pemimpin, dan pemberhentiannya.

Ketentuan tentang pendelegasian jabatan kementerian diatur tentang pembagian kekuasaan kementerian atas kekuasaan *wizarah at tafwid* (kementerian yang menerima kekuasaan penuh dalam mengurus suatu urusan) dan *wizarah at tanfiz* (kementerian yang hanya menerima kekuasaan atas sesuatu urusan secara terbatas), hubungan antara menteri-menteri dan kepala Negara, dan sebagainya.

Ketentuan tentang pendelegasian wewenang panglima perang diatur hal-hal yang menyangkut izin peperangan, pemberangkatan tentara, pembagian tugas komandan, kewajiban komandan, kewajiban prajurit, dan lain-lain.⁹⁶

Ketentuan tentang kekuasaan dalam penumpasan pengacau keamanan dan perealisasi perdamaian diatur hal-hal yang menyangkut penumpasan *ahl ar riddah* (orang-orang murtad), penumpasan para pembangkang, serta penumpasan para pembangkang, serta penumpasan para perampok dan pengacau keamanan lainnya.⁹⁷

Ketentuan kekuasaan peradilan diatur hal-hal yang menyangkut kewajiban mendirikan pengadilan, pengangkatan hakim dan persyaratan-persyaratannya, wilayah kekuasaan hakim, hukum acara dalam peradilan dan lain-lain. Dalam ketentuan tentang wilayah *al mazalim* diatur pula tentang wilayah kekuasaan hakim *al mazalim*, hak dan kewajiban hakim *al mazalim*, hubungan dan batasan wilayah kekuasaan antara hakim pengadilan dan hakim *al mazalim* dan lain-lain. Dalam ketentuan tentang kekuasaan pejabat penyelidikan nasab diatur hal-hal yang menyangkut wilayah kekuasaannya, hak dan kewajibannya, hukum tentang budak, yang menyangkut pernikahan budak, perealisasi *hudud* (delik hukum) atas apa yang dilakukan oleh budak, dan lain-lain.⁹⁸

⁹⁶Hafidz Abdurrahman, *Ibid*, h. 26.

⁹⁷Al-hanbali, *Abu Ya'la Muhammad Ibnu al Husein, Al ahkam al sultaniyyah*. (Beirut: Daar al Fikr, 1994).

⁹⁸Al-hanbali, *Abu Ya'la Muhammad Ibnu al Husein, Al ahkam al sultaniyyah*. (Beirut: Daar al Fikr, 1998), h. 35.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan kedalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkrit dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu:⁹⁹

- a. Prinsip Akidah yang tertuang kedalam 5 rukum Islam dan 6 rukum Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktifitas penegakan, kegiatan *iqtishadiyyah* (ekonomi), dan kegiatan politik, pendidikan, dan lain-lain.
- b. Prinsip Ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahdlah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan lain-lain), melainkan juga meliputi aktivitas *muamalah al-makhlugiyyah* (hubungan interaksional keseluruhan makhluk) termasuk didalamnya hubungan hukum, *Iqtishay* (kegiatan bisnis), politik, budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya.
- c. Prinsip *Syariah* (hukum), dengan prinsip ini menunjukan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji.
- d. Prinsip *Tazkiyah* (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan yang menerima yang suci pula, *innalaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban*.

⁹⁹M. Arifin Hamid, *Ibid*, h. 22.

- e. Prinsip Khilafah (kepemimpinan) yang terkandung didalamnya sejumlah sifat *nubuwwah* seperti *shidiq* (kejujuran), *amanah* (bertanggungjawab), *fathonah* (cerdas), *tablieq* (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada *akhlak*, *ukuwah*, dan *insaniyah* (*humanistik*), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lain.
- f. Prinsip *Mikullah* (pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah SWT), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah SWT, walillahi mulku assamawati wal ardhi (pada Allah lah kepemilikan segala isi langit dan bumi).
- g. Prinsip *A'dalah* (keadilan) didalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezholiman, *Ia tazhlimun wala tuzhlamun*.
- h. Prinsip Keseimbangan (*al-Wustha*) yang mengandung makna *at-tawazhun* suatu kemampuan dan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara *lahiriyah* dan *bathiniyah*.
- i. Prinsip Kemaslahatan (*al-Maslahah*) bahwa dalam menjalankan segala aktifitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan didalamnya tidak semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan

bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.

Di antara beberapa prinsip hukum Islam yang patut disebutkan di sini adalah sebagai berikut:

1. Menyedikitkan Beban

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nanti nya akan memberatkan mereka sendiri, Nabi SAW. Justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum yang sedikit . Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad, dengan demikian hukum Islam tidak lah kaku, keras, dan berat bagi ummat manusia.¹⁰⁰

2. Diciptakan Secara Bertahap (تدريجيا)

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Bangsa arab, ketika Islam datang mempunyai tradisi dan kesenangan sukar di hilangkan dalam sekejasa. Apabila di hilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbul nya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.¹⁰¹

3. Memperhatikan kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula

¹⁰⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, cet. VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), h. 29.

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967). h. 44.

hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

4. Mewujudkan Keadilan

Menurut syari'at Islam, semua. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika iya nerbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan dengan pengadilan .¹⁰²

Hukum Islam bertitik tolak dari prinsip akidah islamiyah yaitu tauhid yang melandasi semua kehidupan dalam Islam termasuk aspek hukumnya. Prinsip hukum Islam selain hal tersebut adalah:

5. Prinsip Hubungan dengan Allah SWT

Hukum Islam mengacu pada hukuman yang seluas-luasnya tidak hanya hubungan antar manusia (hamba) dengan Tuhan, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia.

6. Prinsip Khitbah kepada Allah swt

Prinsip ini, para ahli fikih senantiasa mendasarkan pada pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa pembuat hukum itu adalah Allah.

7. Prinsip Hubungan Akidah dengan Akhlak Karimah.¹⁰³

Prinsip ini berkaitan erat dengan kehormatan manusia, manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehormatan itu,

¹⁰²Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam*, cet II, (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG RI, 1992), h. 121.

¹⁰³Ahmad Hanafi, *Ibid*, h. 32.

manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa seperti dalam QS.

Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah:

a. Mewujudkan keadilan.

Kebanyakan filosof menganggap bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukannya hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan terpintal.

b. Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

c. Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan dalam keadaan darurat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibid. 45

5. *Siyasah syar'iyah*

Siyasah berasal dari bahasa Arab yaitu:

سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ

“Mengatur kaum; memrintah dan memimpinnya”.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengawasan, perekrutan dan arti-arti lainnya.¹⁰⁵

Pengertian harfiah ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain:

- a. Tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian.
- b. Cara pengendalian menuju tujuan tersebut.¹⁰⁶

Sedangkan secara terminologis, banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuris Islam diantaranya: Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan, bahwa *siyasah* adalah perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁰⁷

Sedangkan *Syar'iyah* yang berasal dari kata *syariah* yang secara etimologis berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus

¹⁰⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 40.

¹⁰⁶ A. Djazuli, *Ibid*, h.41.

¹⁰⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), h. 4.

diikuti”, atau “tempat lalu air di sungai”. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang.¹⁰⁸

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syariat adalah hukum-hukum yang bersifat amaliah. Setelah diuraikan definisi siyasah dan syariah, baik secara etimologis maupun terminologis, dapat disimpulkan bahwa siyasah syar’iyyah yaitu kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional.

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar’iyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur’an maupun al-Sunnah.¹⁰⁹

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar’iyyah, yaitu:

1. *Siyasah syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 1.

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 5.

2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amri*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Apabila diringkaskan, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.¹¹⁰

Siyasah syar'iyah adalah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.¹¹¹

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang menumbuhkan pencerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha ayat 27-28, yang berbunyi¹¹²:

وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, Supaya mereka mengerti perkataanku (Qs. At-Thaha:27-28)

¹¹⁰Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 6.

¹¹¹Muhammad Ibal, *Ibid*, h. 2.

¹¹²QS. Thaha 27-28.

Pengertian fiqh secara etimologi, juga ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

Artinya: *Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah akan memberikan dia pemahaman terhadap agama. (HR. Bukhari NO 71).*¹¹³

Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai: “Pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi hak nya, dan apa yang menjadi kewajibannya –atau dengan kata lain- pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan.”¹¹⁴

Al-Amidi mendefinisikan fiqh yang berbeda dengan definisi diatas, yaitu: “Ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat furu’iyyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal”.

Analisis kedua definisi diatas dapat ditemukan hakikat dari fiqh, yaitu :

1. *Fiqh* itu adalah ilmu tentang hukum Allah.
2. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat *amaliah furu’iyah*.
3. Pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili.
4. *Fiqh* itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih.

Secara ringkas dapat dikatakan, “*Fiqh* adalah dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah”.¹¹⁵

¹¹³Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 43.

¹¹⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 3.

¹¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, h. 4.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah*, *munakahat*, *mawaris*, *murafa'at*, *siyasah*, *al-ahkam al-daulyah*.¹¹⁶

Fiqh siyasah merupakan teori-teori politik atau ketatanegaraan dalam prespektif Islam yang merupakan produk ulama swasta yang tercantum dalam berbagai macam kitab atau buku fiqh siyasah semisal dalam kitab *al-Ahkam al-Shulthaniyyah* buah karya al-Mawardi, dan karena itu, ia tidak bersifat mengikat dan memaksa selama belum diangkat menjadi sebuah undang-undang. Dalam kaitan ini, fiqh siyasah sama statusnya dengan fiqh pada umumnya, yakni sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa untuk dipatuhi atau ditaati selama belum diadopsi menjadi undang-undang.

Sebaliknya, *siyasah syar'iyah* merupakan berbagai peraturan yang dilahirkan oleh umara dan atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan (*qawanin*), semisal konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dengan kata lain, yang berwenang menyusun *siyasah syar'iyah* adalah umara atau ulama negeri yang duduk di lembaga

¹¹⁶Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 3.

legislatif, bukan ulama swasta yang tidak memiliki otoritas politik untuk menyusun qanun.¹¹⁷

6. *Siyasah Dusturiyyah*

Istilah *fiqh dustiri*, dan yang di maksud *dustiri* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya,peratur-peraturannya dan adat-adatnya. Sumber *fiqh dusturi* tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan,dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadist terutama sekali yang berhubungan dengan imamah-imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW.

Sumber ke dua adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing,tetapi kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya sesuai dengan prinsip “kebijakan imam sangat bergantung kepada kemaslahatan rakyat.”¹¹⁸

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyyah*. Arti *Siyasah* dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan *Dusturiyyah* ialah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyyah* adalah

¹¹⁷Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafiindo, 2011), h. 19-20.

¹¹⁸A. Djazuli, *Ibid*, h. 53.

keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Siyasah Dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan *Siyasah Dusturiyyah* adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Sumber-sumber fiqh dusturiyyah¹¹⁹ :

- a. al-qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
- b. Al-hadits, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerinyahannya sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu Reorientasi.
- d. Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahtan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak beretentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konversi.

¹¹⁹Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni 1971), h. 157.

Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang-bidang sebagai berikut: Imamah, Hak, Dan Kewajibannya. Menurut al-mawardi adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti tugas kerabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.

Berikut adalah istilah khalifah atau imam yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut al-Qur'an istilah khalifah yang terdapat dalam beberapa surat, antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah/2:30)¹²⁰

Ba'iat Menurut Ibnu Khaldun adalah mereka apabila membai'atkan seseorang Amir dan mengikatkan perjanjian. Mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk mengikrarkan perjanjian. Bisa dikatakan, bai'at itu ketika ada atau ketika terjadi masalah yang berhubungan dengan pemerintahan kemudian membuat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Bai'at dilakukan oleh *Ahlul ahli wa*

¹²⁰Q.S. Al-Baqarah/2:30

al-aqd. Ahl Al-Ahl Wa Al-Aqd (Perwakilan). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, bahwa *ahl al-ahl wa al-aqd* ialah :

- a. pemegang kekuasaan yang mempunyai wewenang memilih dan membai'at imam.
- b. mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan.
- c. mempunyai wewenang membuat undang-undang
- d. tempat konsultasi orang yang mempunyai keluhan tentang pemerintahan.
- e. mengawasi jalannya pemerintahan.¹²¹

Beberapa uraian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ahl al-ahl wa al-aqd* adalah sebuah pemegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya itu juga berwenang dalam membuat undang-undang. Menurut Abd kadir adalah :

- a. *Al-sultan Al-Tanjhidiyah* (eksekutif)
- a. *Al-sultan Al-Tasyri'iyah* (Legislatif)
- b. *Al-sultan Al-Qadha'iyah* (Yudikatif)
- c. *Al-sultan Al-Maaliyah* (bank sentral)
- d. *Al-sultan Al-Mu'raqabah* (konsultatif)¹²²

Fiqh siyasah dapat disederhanakan Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan

¹²¹Khilafah dan Kerajaan, Bandung: Mizan, 1984.

¹²²Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 45.

(*Qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*iddariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*as-Siyasah al-Duali al-Khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan negara non-Muslim (*as-Siyasah al-Duali al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional.¹²³

Sedangkan dalam masa perang (*Siyasah Harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maaliyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.¹²⁴

Karangan *fiqh siyasah* nya yaitu *Al-ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:¹²⁵

1. *Siyasah dushuriyyah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara

¹²³ Al-Mawardi, al-Ahkam as-Shulthaniyyah, Terj. Fadli Bahri, al-Ahkam al-Shulthaniyyah: *Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: Darul Falah, 2014).

¹²⁴ A. Djazuli, *Ibid*, h. 26.

¹²⁵ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Didalamnya mencakup pengangkatan imam, hokum pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahli, syarat imam pemberhentian imam, persoalan bai'ah persoalan hujaroh (kementrian).

2. *Siyasah Dauliyah* (hubungan internasional), yaitu hukum yang mengatur antara waga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan Negara lain. Didalamnya mencakup Hubungan waktu damai (politik, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan) dan hubungan dalam waktu perang.

3. *Siyasah Maliyah*, yaitu hukum yang mengatur tentang penasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.

Menurut Ibn Taimiyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada surat An-Nisa ayat 58 dan 59:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨) يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (٥٩)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.¹²⁶

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *fiqh siyasah* telah selesai, dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

Berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menurut pengaturan siyasah, dibedakan:

adiministratif suatu negara. *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas.

Fiqh siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.,

¹²⁶Ibn Taimiyah, *Al siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dar Al-Kutub al-Arabiyyat Beirut* 1996, h. 4.

Fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.¹²⁷

Dapat dilihat penjelasan di atas bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi dalam hukum Islam disebut dengan *al-Ahkam as- Sulthaniyah* dalam fiqh siyasahnya yaitu *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penulis menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai penyelenggaraan transportasi menurut hukum islam. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Dalam skripsi Panji Windu Arista yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kota Tangerang” menunjukkan bahwa implementasi Trans Tangerang telah berjalan dengan baik dikarenakan sudah cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015. Hal tersebut diketahui dari 53 poin yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal, 41 diantaranya sudah sesuai. Sedangkan 12 poin lainnya terkait fasilitas di halte masih belum sesuai dengan Standar Pelayanan

¹²⁷Djazuli, *Ibid*, h. 30.

Minimal yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 di Kota Tangerang, yaitu kualitas sumber daya manusia; kuantitas sumber daya manusia; lingkungan sosial; lingkungan politik; sumber daya finansial; lingkungan ekonomi; sumber daya peralatan; dan karakteristik agen pelaksana.

Skripsi M. Reza Pahlevi Akbar yang berjudul “Implementasi Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung Terhadap Kendaraan Yang Hilang Atau rusak Bagi pengguna Jasa Secure Parking” menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi yang dilakukan oleh Secure Parking Indonesia Cabang Lampung adalah melakukan kerjasama dalam menetapkan tarif parkir, melakukan pembenahan dan perlengkapan fasilitas parkir, mengansuransikan area parkir, membuat karcis atau kartu parkir serta memberikan kemudahan dalam pengajuan ganti rugi.

Dalam skripsi Frederick Estefan yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pada PT. Gojek Indonesia Di Kota Padang” mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan PerMenhub nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT GO-JEK Indonesia di Kota Padang belum berjalan dengan sesuai

aturan. Hal ini disebabkan oleh PT. GO-JEK Indonesia dan driver yang bergabung pada PT. GO-JEK Indonesia yang merasa keberatan akan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018. Serta kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan peraturan yang sudah ada.

Dari sekian penelitian diatas belum ditemukan adanya pembahasan yang fokus pada penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Menurut Hukum Islam (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).”



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qura'an dan Terjemahannya*. Bandung: Dipenogoro. 2003.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2010.
- Hasyimzoem, Yusraini dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Palmawati Tahir. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017
- Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Soertano, *Metododlogi Peneleitian*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN. 1995.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung. 2015.
- Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung : Sinar Baru. 1991 .
- A'an Efendi. *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandar Lampung: PT Aditya Citra Bakti, 2013.
- Abdul Wahhab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994. Cetakan Ke empat.
- Afrully Rahmat. wawancara dengan penulis. kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. 9 Agustus 2019.

Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Aulia Muthiah. *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.

<https://dishubkominformo.sukabumikab.go.id>.

Ishak. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Iskandar Z. wawancara dengan penulis. kantor Dinas Perhubungan. Bandar Lampung, 10 Agustus 2019.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Juniarso Ridwan. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. cetakan V Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.

M. Arifin Hamid. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Hassanudin. h. 16.

Mochammad Galuh Fauzi. Elisa Susanti. Budiman Rusli. *Analisis Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Menurut Teori The Managerial Decision-Making Process E. F. Harrison. Responsive*. Volume 1 No. 2 Desember 2018.

Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Mohammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. 2007.

Muhammad Sohari Ikhsan. Masyarakat Kota Bandar Lampung. Wawancara Pribadi. Bandar Lampung, 20 Agustus 2019.

Nasruddin Razak. *Dienul Islam*. Cetakan ke-20. Bandung: PT. Alma'arif, 2001.

Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2014.

Palmawati Tahir. Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Raharjo Adisasmita. *Manajemen Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Sakti Adji Adisasmita. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Setiawan. Yudhi. Dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers. 2017.

Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia". Al-Adalah. Vol. X. No. 4 Juli 2012.

Tim Permata Press. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PM Nomor 26 Tahun 2017*.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pusataka Mahardika. 2017.

Warkum Sumitro. *Diskursus tentang Hukum Islam*. Jakarta: Setara Press 2017.

Windari. Ratna Arta. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Zainuddin Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indoesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Jurnal

Rensius pasar ibu, *Implementasi Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tinjau dari Perspektip Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Pasaribu. Vol 4. No 2 (2016).

Internet

<http://nitastory.blogspot.co.id/2008/12/peningkatan-keselamatan-lalu-lintas-dan.html>, diakses tanggal 27 September 2019.

<http://nitastory.blogspot.co.id/2008/12/peningkatan-keselamatan-lalu-lintas-dan.html>, diakses tanggal 27 September 2019.

Sumber: www.bandarlampungkota.bps.go.id diakses pada 02 September 2019 Pukul 17.00.

Wawancara

Muhammad Sohari Ikhsan, Masyarakat Kota Bandar Lampung, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 20 Agustus 2019.

Afrully Rahmat, wawancara dengan penulis, kantor Dinas Perhubungan, Bandar Lampung, 9 Agustus 2019.

Iskandar Z, wawancara dengan penulis, kantor Dinas Perhubungan, Bandar Lampung, 10 Agustus 2019

Afrully Rahmat, wawancara dengan penulis, kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 9 Agustus 2019.

